

INDONESIA MEMENANGKAN OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP AWARDS 2023 WILAYAH ASIA PASIFIK

OGI NEWS

6 SEPTEMBER 2023



OGP AWARDS 2023

ASIA PACIFIC: INDONESIA - EXPANDING LEGAL AID FOR VULNERABLE PERSONS AND GROUPS

Dalam rangkaian kegiatan Open Government Partnership (OGP) Global Summit 2023 yang bertempat di Tallinn, Estonia, Pemerintah Indonesia memperoleh penghargaan sebagai Juara 1 OGP Awards 2023 untuk wilayah Asia Pasifik. Penghargaan tersebut dicapai melalui komitmen keterbukaan pemerintah, yaitu Perluasan Bantuan Hukum bagi Individu dan Kelompok Rentan di Indonesia.

During the Open Government Partnership (OGP) Global Summit 2023 held in Tallinn, Estonia, the Government of Indonesia was honored as the Champion of OGP Awards 2023 for the Asia Pacific region. The award was achieved through the open government commitment, which is the Expansion of Legal Aid for Vulnerable Individuals and Groups in Indonesia.

Penghargaan diterima secara langsung oleh Deputi bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bapak Bogat Widyatmoko, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Kementerian Hukum dan HAM, Bapak Widodo Ekatjahjana, dan Direktur Eksekutif Indonesia Judicial Research Society (IJRS), Bapak Dio Ashar Wicaksana.

Saat ini, Pemerintah telah memberikan jaminan bantuan hukum kepada masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Penyelenggaraan Bantuan Hukum diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pendampingan dalam perkara litigasi maupun non-litigasi. Proses ini dilaksanakan melalui Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang berkewajiban untuk mendampingi penerima bantuan hukum untuk menghadapi proses hukum yang dimilikinya, dengan biaya selama proses tersebut ditanggung oleh Pemerintah. Sejak tahun 2013 jumlah penyelenggara bantuan hukum terus meningkat, hingga saat ini berjumlah 619 OBH. Berdasarkan Data Penerima Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi 2016-2022 dari Badan Pembinaan Hukum Nasional, komitmen ini telah membantu 94.633 masyarakat miskin, dengan rincian 72.139 masyarakat miskin dengan proses litigasi, dan 22.494 masyarakat miskin dengan proses non-litigasi.

The award was received directly by the Deputy for Politics, Law, Defense and Security, Ministry of National Development Planning/National Development Planning Agency (Bappenas), Mr. Bogat Widyatmoko, the Head of the National Law Development Agency (BPHN), Ministry of Law and Human Rights, Mr. Widodo Ekatjahjana, and the Executive Director of the Indonesia Judicial Research Society (IJRS), Mr. Dio Ashar Wicaksana.

At the present, the Government has provided a guarantee legal aid to low-income communities in accordance with the mandate of Law No. 16/2011 on Legal Aid. The implementation of Legal Aid is provided to people who need assistance in litigation and non-litigation cases. This process is carried out through Legal Aid Organizations (OBH) which are obliged to accompany legal aid recipients to face the legal process they have, with the costs during the process covered by the Government. Since 2013 the number of legal aid providers has continued to increase, currently there are 619 OBH. Based on Data on Recipients of Litigation and Non-Litigation Legal Aid 2016-2022 from the National Law Development Agency, this commitment has helped 94,633 poor people, with details of 72,139 poor people with litigation processes, and 22,494 poor people with non-litigation processes.

Nilai manfaat yang tinggi, serta dampak baik yang dihasilkan komitmen ini, mendorong hadirnya komitmen lebih tinggi untuk menghadirkan bantuan hukum yang tidak hanya terbatas bagi masyarakat miskin, tetapi juga kelompok rentan lainnya. Pada tahun 2022, melalui proses ko-kreasi antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keterbukaan Pemerintah di Sektor Akses terhadap Keadilan, Pemerintah berupaya menghadirkan manfaat bantuan hukum yang lebih luas berlandaskan kondisi dan kebutuhan hukum di lapangan melalui penyelenggaraan Survei Kebutuhan Hukum bagi Kelompok Rentan.

Melalui survei tersebut, direkomendasikan tiga hal untuk penyelenggaraan bantuan hukum yang lebih inklusif, yaitu: revisi Undang-Undang Bantuan Hukum, peningkatan anggaran bantuan hukum, dan implementasi standar layanan bantuan hukum yang lebih luas. Hal ini dilakukan untuk memperluas kelompok yang dapat memperoleh manfaat bantuan hukum, meningkatkan standarisasi pemberian bantuan hukum bagi kelompok rentan, dan memberikan penguatan kapasitas OBH untuk pemberian layanan terhadap kelompok rentan.

The high benefits, as well as the good impact that this commitment has generated, encourages a higher commitment to provide legal aid that is not only limited to the poor, but also other vulnerable groups. In 2022, through a co-creation process between the Ministry of Law and Human Rights and the Civil Society Coalition for Open Government in the Access to Justice Sector, the Government seeks to provide broader legal aid benefits based on legal conditions and needs in the field through the implementation of the Legal Needs Survey for Vulnerable Groups.

Through the survey, three things were recommended for the implementation of more inclusive legal aid, namely: revising the Legal Aid Law, increasing the legal aid budget, and implementing broader legal aid service standards. This is done to expand the groups that can benefit from legal aid, increase the standardization of legal aid provision for vulnerable groups, and strengthen the capacity of OBH to provide services to vulnerable groups.

Komitmen ini mendapatkan penghargaan dalam OGP Awards 2023 untuk kategori negara anggota OGP wilayah Asia-Pasifik, setelah berhasil mendapatkan penilaian baik, mulai dari proses pencalonan yang dilaksanakan transparan dan melibatkan unsur non-pemerintah, hingga dampak implementasi komitmen tersebut dan inovasi yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM bersama dengan mitra organisasi masyarakat sipilnya. Selain itu, Indonesia juga berhasil bersaing dengan 8 nominasi lainnya dari wilayah Asia Pasifik, termasuk Korea Selatan dan Filipina. Melalui capaian tersebut, Pemerintah mendemonstrasikan komitmennya untuk mendorong pelaksanaan nilai-nilai keterbukaan pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik.

This commitment was awarded in the OGP Awards 2023 for the category of OGP Awards in the Asia-Pacific region, after successfully receiving good ratings, from the nomination process that was carried out transparently and involved non-governmental elements, to the impact of implementing the commitment and innovations made by the Ministry of Law and Human Rights together with its civil society organization partners. In addition, Indonesia also successfully competed with 8 other nominees from the Asia Pacific region, including South Korea and the Philippines. Through these achievements, the Government demonstrates its commitment to encourage the implementation of open government values to realize better governance.